

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peningkatan polusi udara Tiongkok yang terjadi pada tahun 2013 ditandai dengan tebalnya kabut asap yang terjadi di Beijing. Peningkatan polusi udara tersebut terjadi diakibatkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil yakni batu bara dan minyak secara besar-besaran untuk aktivitas industri pabrik. Sebagian besar jenis batu bara yang digunakan oleh pabrik-pabrik industri Tiongkok merupakan jenis batu bara muda yang dapat menghasilkan polutan lebih banyak dibandingkan dengan jenis batu bara biasa. Penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya peningkatan polusi udara Tiongkok ialah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta peningkatan penggunaan batu bara selama musim dingin guna penghangat ruangan dan memasak bagi masyarakat.

Peningkatan polusi udara Tiongkok pada tahun 2013 mengakibatkan terjadinya penyebaran polusi udara hingga ke Jepang. Polusi udara Tiongkok tersebar ke beberapa wilayah di Jepang seperti Kitakyushu, Tokyo, Yamaguchi, Nagasaki, Fukuoka, Chiba, Matsue, Kansai, dan sebagainya. Polusi udara Tiongkok merupakan polusi udara PM 2.5 yang merupakan jenis partikel polusi udara paling berbahaya karena terdiri dari beberapa partikel beracun seperti partikel timah hitam dan gas buangan. Selain itu polusi udara PM 2.5 ini memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dan kasat mata. Berdasarkan penetapan dari *Basic Environment Law* menetapkan standar normal konsentrasi PM 2.5 sehari-hari ialah 35 mikrogram. Sementara itu melalui pengumpulan data

ditemukan bahwa konsentrasi PM 2.5 tertinggi di Jepang terjadi di kota Ichihara yang telah mencapai jumlah konsentrasi 127 mikrogram per meter kubik. Penyebaran polusi udara Tiongkok tidak hanya berupa kabut asap PM 2.5, tetapi juga ditemukan berupa debu kuning serta hujan asam.

Dampak buruk yang dialami Jepang dari peristiwa ini dirasakan terjadi kepada beberapa aspek. Pada aspek kesehatan banyak masyarakat Jepang yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti iritasi mata dan kulit hingga gangguan kesehatan berat seperti gangguan pernafasan, paru-paru dan kanker. Pada aspek lingkungan hidup munculnya kekhawatiran krisis pangan karena terjadinya penurunan produktifitas serta penurunan kualitas pangan. Pada aspek sosial dan politik memunculkan berbagai macam protes dari masyarakat yang mengeluhkan dampak buruk yang dialami dari permasalahan ini serta dapat memicu terjadinya konflik baru antara Jepang dan Tiongkok jika permasalahan ini berlanjut. Pada aspek ekonomi mengakibatkan kerugian miliaran dolar dimana terjadinya peningkatan pengeluaran biaya kesehatan, terjadinya kerusakan bangunan-bangunan di Jepang serta penurunan aktivitas ekonomi masyarakat Jepang.

Permasalahan polusi udara Tiongkok menjadi permasalahan yang serius bagi Jepang dimana Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa peristiwa polusi udara ini telah menjadi ancaman dan ketakutan bagi Jepang. Melalui kepala kabinet sekretaris Yoshihide Suga menyatakan bahwa pemerintah Jepang akan mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan ini.

Tindakan yang diambil oleh Jepang dalam mengatasi permasalahan ini ialah dengan menetapkan kebijakan luar negeri terhadap polusi udara Tiongkok. Dalam penetapan dan perumusan kebijakan luar negeri terkait isu ini dilakukan oleh menteri luar negeri yang memiliki tanggung jawab terhadap pembuatan kebijakan luar negeri selain itu menteri lingkungan, birokrat serta kepala kabinet atau Perdana Menteri turut ambil andil dalam perumusan kebijakan ini. Setelah kebijakan luar negeri di rumuskan, selanjutnya kepala kabinet atau Perdana Menteri meneruskan rumusan kebijakan tersebut kepada diet. Rumusan kebijakan yang telah diterima diet akan ditinjau, diubah, dan disahkan oleh diet menjadi kebijakan luar negeri yang akan digunakan.

Menteri luar negeri, menteri lingkungan, birokrat dan Perdana menteri Shinzo Abe memiliki dua alternatif kebijakan yakni pertama melalui diplomasi dimana dilaksanakannya TEMM (*Tripartite Environmental Ministers Meeting*) yang merupakan pertemuan tahunan menteri-menteri lingkungan Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dimana membahas mengenai dialog kebijakan terkait dengan isu lingkungan. Alternatif kedua melalui penggunaan instrumen ekonomi melalui pendistribusian bantuan luar negeri ODA Jepang. Selanjutnya rumusan kebijakan luar negeri ODA diteruskan kepada Diet untuk ditinjau, ataupun diubah dan kemudian disahkan. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, partai LDP menjadi partai yang mendominasi didalam Diet. Rumusan kebijakan luar negeri ODA tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai kebijakan luar negeri yang akan digunakan dalam mengatasi polusi udara Tiongkok.

Kebijakan ODA dipilih dikarenakan Jepang telah lama menjadikan kekuatan ekonominya sebagai instrumen ekonomi dalam kebijakannya. Perdana Menteri Shinzo Abe turut mendukung penggunaan instrumen ekonomi ODA dikarenakan Perdana Menteri Shinzo Abe masih terus berusaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Jepang sehingga akan dapat digunakan dalam membantu mengatasi permasalahan internasional. Selain itu melalui kebijakan ODA ini Jepang dapat meningkatkan ekspor teknologi canggihnya ke Tiongkok. Ini sesuai dengan kepentingan LDP yang menjadi partai mayoritas dalam Diet pada saat itu. Disamping itu, melalui kebijakan bilateral ODA ini akan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan luar negeri kedua negara sehingga hubungan bilateral kedua negara tersebut dapat semakin erat dan mengurangi kemungkinan munculnya konflik baru. Ini menjadi kepentingan bagi DPJ dimana peningkatan hubungan bilateral dengan negara lain merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Implementasi kebijakan luar negeri ODA dilakukan oleh kabinet dimana Perdana Menteri Shinzo Abe memberikan mandat kepada kementerian luar negeri, kementerian keuangan, kementerian perdagangan industri serta badan perencanaan keuangan untuk menerbitkan ODA ke Tiongkok guna mengontrol polusi udara. Selanjutnya setelah ODA diterbitkan, penyaluran ODA dilakukan oleh JICA ke Tiongkok. JICA menyalurkan ODA melalui bentuk kerjasama teknik dengan melakukan proyek pengembangan kapasitas perencanaan untuk pengendalian pencemaran O₃ dan PM_{2.5} di atmosfer. Proyek ini akan berlaku semenjak November 2013 hingga November 2016.

5.2 Saran

Isu lingkungan merupakan isu yang menarik dimana dari isu ini akan dapat terlihat bagaimana permasalahan lingkungan global saat ini akan dapat membawa interaksi antar negara berakhir sebagai sebuah kerjasama atau sebagai sebuah konflik baru. Permasalahan polusi udara Tiongkok yang telah menyebar ke Jepang memberikan dampak buruk serta dapat memperburuk hubungan bilateral kedua negara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Jepang mengambil tindakan melalui kebijakan luar negerinya dan sebaiknya kedua negara tersebut melakukan kerjasama berkelanjutan dalam mengatasi polusi udara Tiongkok. Diharapkan pendistribusian ODA Jepang dalam kerjasama teknik dan transfer teknologi tidak akan terhenti sampai di tahun ini, semoga kedepannya Jepang dapat memperbaharui kebijakan ODA-nya dalam permasalahan ini untuk tahun-tahun selanjutnya hingga polusi udara Tiongkok dapat diatasi. Selain itu diharapkan juga akan adanya penelitian lanjutan yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap polusi udara Tiongkok untuk tahun-tahun selanjutnya. Sehingga akan terlihat bagaimana perkembangan dan pembaharuan terkait pembahasan dari penelitian ini.

